



Berjualan di Luar Pasar

Disperindag Ambil Alih Belasan Lapak Pedagang

Bangli (Bali Post) -

Puluhan pedagang di Pasar Kidul yang kembali berjualan di luar bangunan dan memadati ruas jalan sekitar pasar akhirnya disikapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangli. Belasan tempat berjualan yang telah didapatkan sebelumnya terpaksa diambil alih. Hal ini sebagai bentuk ketegasan terhadap aturan yang ada.

Kadisperindag Bangli I Nengah Sudibia, Jumat (29/5) kemarin mengungkapkan pengambilan kembali terhadap tempat berjualan pedagang ini karena pedagang tidak lagi menempati dan lebih memilih berjualan di luar pasar. Sikap pedagang ini dinilai telah menyalahi aturan dan tidak menghiraukan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. "Pedagang tidak menaati aturan, kami ambil alih tempatnya berjualan," terangnya.

Dikatakan lebih lanjut, sikap pedagang ini justru berpotensi merugikan pedagang yang berjualan di dalam pasar lantaran pembeli lebih memilih berbelanja di luar pasar. Lanjutnya, jumlah tempat berjualan

yang diambil alih mencapai 17 unit dan sudah diberikan tanda silang merah. Pascapengambilan tempat berjualan ini, beberapa pedagang dikatakan mendatangi Disperindag untuk melakukan klarifikasi. Akan tetapi, pihak Disperindag tidak langsung memberikan pedagang untuk menempati tempat berjualannya, melainkan diberikan pembinaan terlebih dahulu.

"Beberapa pedagang ada yang datang ke kantor. Itu kami berikan pembinaan lagi. Setelah mereka sepakat, baru kami serahkan kembali tempat berjualannya," ungkapnya.

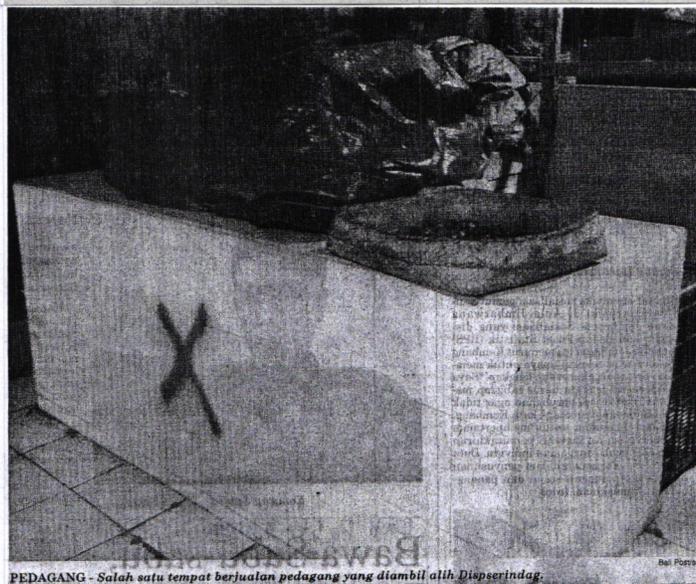
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kabid Perdagangan Disperindag G.P. Wahyuda mengungkap-

kan sikap pedagang yang membandel ini membuat pihaknya kelimpungan. Pembinaan yang diberikan kepada pedagang sudah dilakukan berkali-kali. Namun, berbekal alasan yang sepele, yakni tidak dapat berjualan, sejumlah pedagang lebih memilih kembali berjualan di luar pasar tanpa memperhatikan kenyamanan pasar.

"Mereka kembali keluar dari Pasar Kidul, padahal mereka sudah dapat tempat," katanya. Di sisi lain, Kasi Perizinan Usaha Perdagangan I Dw. Ketut Kantor juga sempat menjelaskan tempat berjualan pedagang yang diambil alih oleh Disperindag, selain disebabkan karena

pedagangnya berjualan di luar pasar, juga pedagang melakukan penukaran tempat berjualan, menempati tempat yang belum diundi oleh Disperindag dan belum pernah menempati tempat yang didapatkan dari hasil pengundian sebelumnya.

"Beberapa hal itu kami jadikan pertimbangan untuk ambil alih tempat berjualan pedagang," ucapnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, meskipun Disperindag telah melakukan sikap tegas, sejumlah pedagang masih terlihat memadati ruas jalan yang berada di sebelah utara pasar. Hal ini membuat pemandangan kota nampak semrawut. (kmb45)



PEDAGANG - Salah satu tempat berjualan pedagang yang diambil alih Disperindag.

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 18



Dewan Prioritaskan Pembangunan Fisik RSU

Bangli (Bali Post) -

Dewan berkomitmen mengarahkan dana APBD untuk kelanjutan pembangunan sarana fisik RSU Bangli. Hal ini dipandang perlu mengingat pengadaan sarana alat kesehatan tanpa diimbangi penyediaan gedung akan mubazir. "Kalau hanya pengadaan alat tanpa ada ruangan untuk pengoperasiannya tentunya akan mubazir," Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata, Jumat (29/5) kemarin.

Dia mengatakan, karena kemampuan APBD Bangli

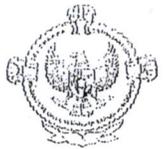
sangat kecil, maka pembangunannya hanya bisa dilakukan secara bertahap. Dirinya berharap pihak rumah sakit bisa membuat proposal ke pemerintah pusat, agar pembangunan fisik bisa dilakukan. "Harapan kami agar bagaimana caranya pihak rumah sakit bisa menarik dana pusat untuk pembangunan fisik. Selama ini pengadaan alat kesehatan banyak ditembus menggunakan dana pusat," ujarnya.

Kutha Parwata mengatakan terkait komitmen ini pihaknya akan menyam-

paikan dalam rapat kerja mendatang. Selain mengupayakan pembangunan sarana fisik, pihaknya juga berharap eksekutif bisa menangani kekurangan dokter ahli di Bangli. Apalagi dalam kunjungan kerja ke salah satu rumah sakit di Yogyakarta belum lama ini, sudah ada kesiapan pihak rumah sakit di sana untuk membantu kekurangan dokter ahli di Bangli. "Kita akan dorong agar pihak rumah sakit untuk menindaklanjuti tawaran tersebut," imbuhnya. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 18



Di Ubud dan Sukawati Rp 700 Juta untuk Bangun Posko Damkar



Bali Post/dar

BERTEMU - Sekda Ida Bagus Gaga Adisaputra bertemu dengan Camat, Lurah, dan LPM Ubud, Jumat (29/5) kemarin.

Gianyar (Bali Post) -

Tahun 2015, posko damkar di Kecamatan Ubud dipastikan bisa terwujud. Pemkab Gianyar telah menyediakan dana Rp 700 juta untuk pembangunan posko damkar. Ketua BPBD Gianyar, Anak Agung Gde Oka Digjaya, Jumat (29/5) kemarin, mengatakan, untuk lokasi, akan menggunakan lahan milik Dinas Pertanian Provinsi Bali, yang luasnya empat are. "Kami sudah melakukan pendekatan dengan provinsi dan sudah diberikan penggunaan lahan," katanya.

Dengan kepastian ini, pembangunan posko pemadam kebakaran (damkar) di dua kecamatan yakni Sukawati dan Ubud tidak lagi sekadar wacana. Keberadaan posko damkar itu kini telah menjadi kebutuhan bagi kedua wilayah. Terlebih kawasan Ubud sebagai kawasan wisata. Keberadaan posko damkar sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kebakaran.

Sementara untuk pembangunan posko damkar di Kecamatan Sukawati, rencananya menggunakan lahan di rumah dinas Camat Sukawati, di Banjar Gelumpang. Pembuatan posko damkar tersebut

sudah melalui kajian dan sudah dipersiapkan pembangunannya. "Pembangunan posko damkar di kedua kecamatan itu bukan wacana lagi," lanjut Oka Digjaya.

Damkar Gianyar yang selama ini poskonya terpusat di BPBD Gianyar, Stadion Dipta, Desa Buruan, sejak enam bulan lalu sudah menugaskan satu unit damkar ke Ubud. Karena keterbatasan posko maka mobil damkar beserta petugas untuk sementara bersiap di wantilan Dalem Puri Ubud dan kini di Kantor Camat Ubud. "Jika pembangunan posko sudah selesai, maka mobil damkar akan diletakkan di sana," katanya.

Sementara secara terpisah, Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adisaputra dalam kunjungannya ke Ubud kemarin, menginstruksikan Camat Ubud untuk segera memindahkan pos *stand by* mobil pemadam kebakaran (damkar). Yang sebelumnya ditempatkan di Kantor Camat agar dipindah ke Pasar Ubud.

Didampingi Camat, Lurah, dan Ketua LPM Ubud, Sekda menilai keberadaan mobil damkar di lokasi yang sentral sangat diperlukan. Selain memang untuk memberi rasa

aman terhadap masyarakat yang beraktivitas, juga berdampak terhadap keamanan psikologis mereka, baik bagi turis maupun warga lokal. "Saat masyarakat dan turis melihatnya, akan berdampak terhadap keamanan psikis mereka," ucapnya.

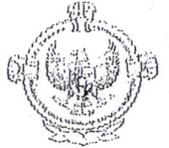
Lebih lanjut, Sekda memprediksi nantinya juga akan ada riak ketidaksetujuan oleh sebagian warga. Sebab, menurut pandangan mereka, diletakkannya mobil damkar di sekitar Pasar Ubud akan mengganggu ruang aktivitas masyarakat. "Saya siap berkoordinasi dan memberi pengertian terhadap warga

yang tidak setuju," ujarnya.

Ketua LPM Ubud, Cokorda Gde Putra Sukawati, selaku perwakilan dari tokoh masyarakat, mendukung penuh imbauan Sekda. Hal tersebut semata-mata demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Apalagi, Ubud baru saja memperoleh predikat sebagai 15 destinasi terbaik dunia versi Tripadvisor. Hal tersebut memacu pihaknya, untuk makin giat meningkatkan kualitas pariwisata di Ubud. Meski beberapa permasalahan masih sulit untuk dicarikan solusinya, seperti kemacetan. (kmb16)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 11



Dihukum 15 Tahun Penjara

Oknum Staf Kejati Bali Tak Banding

Denpasar (Bali Post) -

Pasrah dan menyerah, itulah yang tergambar dari sosok oknum staf Kejati Bali yang divonis 15 tahun penjara atas perkara korupsi uang hasil sitaan korupsi IHDN Denpasar. Nyoman Budi Permadi tidak akan melakukan upaya hukum banding, bahkan tidak akan mengembalikan uang pengganti sebagai akibat kerugian negara sebanyak Rp 1,765 miliar. Hal itu disebutkan salah satu kuasa hukumnya, Ni Ketut Rima Nurdiana, Jumat (29/5) kemarin.

Pascadibacakan vonis, Rima sebelumnya mengaku akan berkoordinasi dengan orangtua terdakwa. "Sekarang sudah dipastikan Budi Permadi tidak akan banding. Kami menerima hukuman itu," tandas satu-satunya pengacara perempuan yang mendampingi Permadi.

Pun ketika disinggung soal pengembalian kerugian uang

negara, Rima memastikan Budi Permadi tidak akan mengembalikannya. "Bagaimana mau membayar denda, utangnya di luar kasus ini banyak sekali," jelasnya.

Budi Permadi akan menerima vonis hukuman 15 tahun tersebut. Bahkan jika dikalkulasi karena tidak akan membayar Rp 1,765 miliar dan denda Rp 200 juta, maka total hukuman menjadi 19 tahun penjara.

Sebagaimana diberitakan, vonis majelis hakim pimpinan Acmad Peten Sili itu jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. JPU Wayan Sutarjana dkk. menuntut supaya terdakwa dihukum 6,5 tahun. Namun hakim tidak sependapat, dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

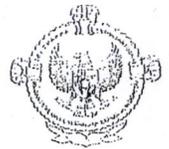
Budi Permadi pada sidang dinilai tak acuh dan tidak mau mengembalikan uang yang dikorupsi. Oknum staf kejaksaan yang sebelumnya diper-

caya mengelola barang bukti uang hasil korupsi itu pun divonis selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili didampingi hakim ad hoc Miptahul dan Nurbaya Gaol.

Hukuman tinggi ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, saat agenda pemeriksaan terdakwa, Budi Permadi cengar-cengir tanpa ada penyelesaian. Jika kelakuannya seperti itu dan tidak mau mengembalikan kerugian negara, hakim pun mengancam akan membuat kasus ini geger. Ini dibuktikan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Selain memutuskan menghukum selama 15 tahun penjara, Budi Permadi dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Di samping itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian negara sebanyak Rp 1,765 miliar. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 3



Disdikpora Kembali Berencana Rekrut GTT

Bangli (Bali Post) -

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli kembali berencana merekrut guru tidak tetap (GTT). Itu dilakukan mengingat jumlah tenaga pengajar saat ini masih kurang. Kepala Disdikpora Nyoman Suteja saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, perekrutan GTT tersebut sejauh ini masih dalam rencana. Pihaknya belum bisa menyampaikan kapan perekrutan GTT akan dilakukan. "Kami baru berencana. Nanti kalau sudah dapat restu dan jelas, pasti akan kami umumkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai hasil pendataan yang dilakukan pihaknya selama ini, Kabupaten Bangli kekurangan

guru sekitar 400 lebih. Namun, jumlah tersebut baru sedikit tertutupi, setelah Disdikpora melakukan rekrutmen GTT sebanyak 184 orang pada tahun 2014 lalu. "Kekurangannya masih lagi 50 persen lebih," imbuhnya.

Disinggung adanya sorotan dari sejumlah pihak terkait tidak meratanya penempatan GTT hasil rekrutmen 2014 lalu, mantan Kabiddikmen ini mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pendataan, di sekolah mana saja terjadi kekurangan dan kelebihan guru. Jika nantinya ditemukan ada sekolah yang kelebihan guru maka tidak menutup kemungkinan guru di sekolah itu akan dipindah.

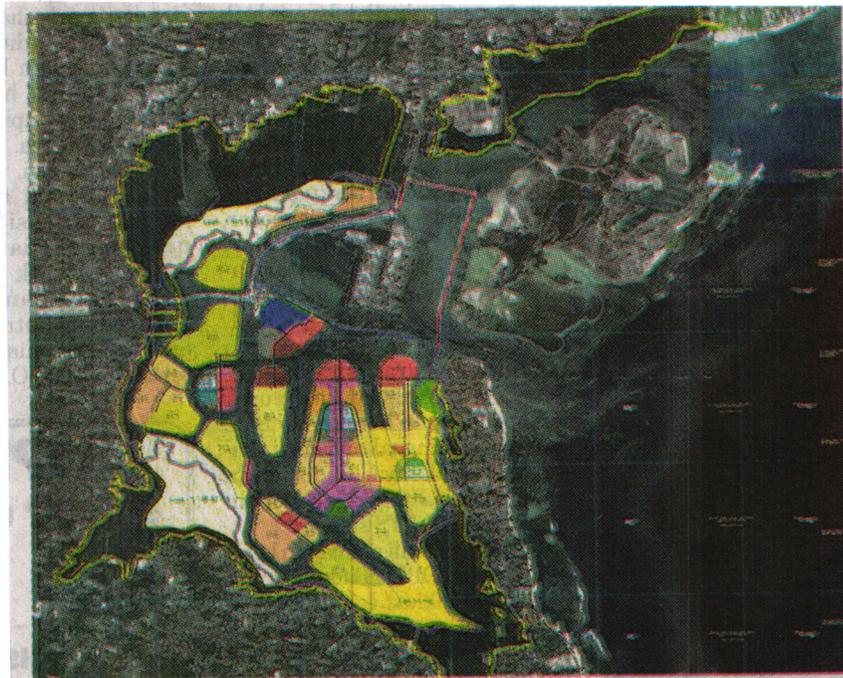
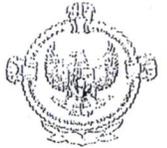
"Walaupun saat perekrutannya dia melamar di seko-

lah yang dituju, tapi kalau ternyata di sana kelebihan guru tidak menutup kemungkinan dia akan dipindahkan di sekolah yang masih kekurangan," ujarnya. Sebelumnya Disdikpora sempat melakukan perekrutan GTT. Proses perekrutan dilakukan melalui serangkaian tes yakni administrasi, tes tulis dan wawancara. Oleh sejumlah dewan perekrutan GTT kala itu sempat dituding menyalahi aturan.

Sebab sesuai peraturan pemerintah nomor 48, Pemkab Bangli seharusnya tidak boleh mengangkat GTT maupun PTT. Tak hanya itu dewan juga menyayangkan proses perekrutan GTT yang tidak memprioritaskan tenaga pengabdian. (kmb40)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 18



KUNING - Kawasan berwarna kuning adalah areal Tahura yang dikatakan tidak ditumbuhi mangrove. Areal Tahura yang tidak ditumbuhi mangrove masuk dalam masterplan rencana reklamasi.

Dishut Ingin Tukar-menukar Kawasan Tahura Bantah Muluskan Rencana Reklamasi

Denpasar (Bali Post) -

Dinas Kehutanan Bali, Jumat (29/5) kemarin, memberikan konfirmasi tertulis terkait acara Sosialisasi Fungsi Tahura Ngurah Rai di Dinas Kehutanan Bali (bukan Bappeda Bali) (BP, 29/5). Kepala Dinas Kehutanan Bali Ir. IGN Wiranatha, M.M. membantah bila kegiatan ini bertujuan untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa seperti tudingan Koordinator ForBALI Wayan "Gendo" Suardana.

"Tidak benar. Kegiatan ini justru upaya penanganan dalam kaitan perambahan ka-

wasan hutan, pensertifikatan kawasan hutan, tumpang tindih kawasan dan kerusakan hutan," ujarnya dalam jawaban tertulis yang dikirim, Jumat (29/5) kemarin.

Poin kerusakan hutan menjadi hal yang cukup menarik. Pasalnya, Wiranatha menyebut kerusakan hutan ini lantaran adanya kawasan di Tahura seluas kurang lebih 169,95 hektar (ha) berupa perairan yang sulit ditumbuhi mangrove sehingga secara konvensional tidak bisa ditanami. Kawasan itu berada di areal Tahura Ngurah Rai di sebe-

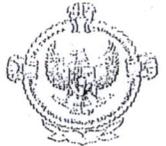
lah timur (Desa Tanjung Benoa) seluas 100,58 ha dan di areal Tahura Ngurah Rai di sebelah selatan (Desa Benoa) seluas kurang lebih 69,37 ha.

"Terhadap kerusakan hutan di kawasan Tahura Ngurah Rai yang salah satunya di Pulau Pudut sudah diketahui sejak dilaksanakan evaluasi Tahura Ngurah Rai pada 2007 dan lebih detail pada evaluasi tahun 2012, sehingga perlu dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi Tahura Ngurah Rai," lanjutnya.

Hal. 27
Kesesuaian Fungsi

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Kesesuaian Fungsi

Dari Hal. 1

Wiranatha menjelaskan, evaluasi kesesuaian fungsi Tahura Ngurah Rai telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Hasilnya areal timur dan selatan dinilai tidak dapat ditumbuhi mangrove.

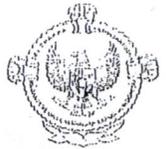
Kementerian Kehutanan juga menyatakan areal di luar kawasan Tahura seluas kurang lebih 238,79 hektar mempunyai kondisi mangrove cukup baik dan menjadi habitat satwa, sehingga layak menjadi kawasan hutan.

Atas evaluasi itu, areal yang tidak layak dikelola sebagai kawasan Tahura Ngurah Rai disarankan untuk segera dapat diproses antara lain melalui perubahan fungsi tukar-menukar kawasan atau revisi tata ruang wilayah provinsi. "Evaluasi Tahura pada tahun 2012, kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya diubah bloknnya dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan. Meski

demikian, berdasarkan tim dari Kementerian Kehutanan, wilayah tersebut dapat dialih-fungsikan untuk ditukar dengan kawasan yang ada hutan bakaunya," tandasnya.

Wiranatha menyebut ada masukan dari masyarakat yang menghendaki untuk mengeluarkan Pulau Pudut dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Dikatakan, Bupati Badung melalui surat No. 556/5568/Diparda, tanggal 27 Desember 2011 juga mengusulkan agar dilakukan perubahan zonasi di Pulau Pudut dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan.

"Jadi dalam rangka penataan dan pengembangan Pulau Pudut sebagai pesona wisata Kabupaten Badung, Pulau Bali pada umumnya yang nantinya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya sebagai daerah tujuan wisata," paparnya. (kmb32)



Harus Berdasarkan Kajian Komprehensif

Pemasangan Separator Permanen di Jalan Teuku Umar

Denpasar (Bali Post) –

Pemasangan separator (pemisah jalan) di Jalan Teuku Umar, Denpasar, saat ini masih bersifat sementara. Bila harus diganti dengan separator permanen, maka Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar harus melakukan kajian secara komprehensif. Hal ini untuk menghindari adanya persoalan di kemudian hari.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriadi di kantornya, Jumat (29/5) kemarin. "Kami berharap agar Dishub melakukan kajian secara matang untuk membuat separator di Jalan Teuku Umar. Jangan sekali-sekali hanya berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Tujuan pemasangan itu, yakni untuk kelancaran arus lalu lintas," ujar politisi PDI-P ini.

Eko Supriadi mengatakan, kelancaran arus lalu lintas di Jalur Teuku Umar harus bisa terwujud dengan beberapa kebijakan yang dilakukan Dishub. Salah satunya, yakni membuat separator tersebut. Hanya, untuk kelancaran arus dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya saja, penempatan *u-turn* juga harus benar-benar dilakukan dengan berdasarkan kajian.

Untuk *u-turn*, kata Eko Supriadi, harus diperhitungkan beberapa titik harus dibuat, meski tidak secara permanen. Artinya, bisa ditutup dan dibuka seperti di depan RS Kasih Ibu. Pembuatan *u-turn*

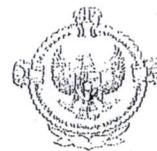
di titik ini karena sering digunakan untuk kendaraan yang *emergency*. "Kalau kendaraan yang mengantar pasien darurat, kita masih toleransi," katanya.

Saat ini, Dishub Denpasar telah menempatkan separator yang tidak permanen di Jalan Teuku Umar. Hal ini untuk menghindari adanya kendaraan yang berputar arah secara sembarangan. Terlebih, ancaman kemacetan arus lalu lintas di Kota Denpasar kian parah. Terutama, di jalur-jalur yang menjadi kawasan pusat perdagangan dan bisnis seperti di Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro serta Jalan Imam Bonjol.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub Kota Denpasar akan melakukan kajian arus lalu lintas di beberapa kawasan. Bukan hanya itu, Dishub juga akan memperbanyak pemasangan rambu lalu lintas. "Kami sudah melakukan kajian untuk mengatasi kemacetan jangka pendek, menengah dan panjang," ujar Kadis Perhubungan I Gede Astika. (kmb12)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

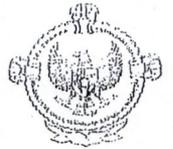
Hal : 2



Sambungpa - - -



SEPARATOR - Dishub Denpasar memasang separator di Jalan Teuku Umar untuk mengurangi kekroditan di jalan itu.



Pencatat Meteran PDAM Dilengkapi GPS

Tabanan (Bali Post) -

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tabanan mulai mengaktifkan pelayanan pelanggan berbasis teknologi informasi (TI). Petugas catat meteran kini tidak hanya menggunakan pena dan kertas, namun juga memotret dengan telepon seluler (ponsel). Pelayanan berbasis TI dipilih untuk menekan tingkat keluhan pelanggan. Salah satu

pelayanan yang kerap kali dikeluhkan pelanggan yakni kekeliruan dalam hal penghitungan meteran air atau sambungan langsung (SL).

Direktur PDAM IB Oka Sedana, Jumat (29/5) mengatakan, inovasi ini sebenarnya sudah lama hanya penyempurnaan sistem baru dimulai awal tahun 2015. Dijelaskannya, teknologi *Global Positioning System* (GPS)

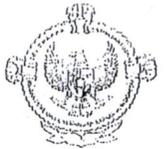
yang diaplikasikan di dalam ponsel bersistem android ini dilakukan untuk melakukan proses penghitungan meteran SL pelanggan. Ponsel ini digunakan secara *online* dengan mengaktifkan GPS yang terkoneksi ke server yang ada di ruang khusus PDAM. "Para petugas pencatat meteran PDAM dilengkapi GPS untuk memantau apa mereka menjalankan tugas dengan benar.

Bukti pencatat meteran ini akan disimpan, ketika ada keluhan dari pelanggan mengenai pembayaran, maka bukti pencatatan akan mudah di-*cross check*, dan validasi data bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Di Tabanan ada 44 petugas pencatat meteran tersebar di berbagai wilayah. Dengan dilengkapi GPS, tingkat akurasi penghitungannya akan mak-

simal. Sistem ini juga bisa meminimalisasi kesalahan penghitungan biaya yang harus dibayarkan pelanggan karena hasilnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem GPS yang tercatat di server.

Disinggung tentang penerapan pembayaran tagihan PDAM secara *online*, ia mengatakan pembayaran 95 persen sudah efektif. (kmb28)



Pendataan Langsung ke Rumah-rumah

Akhir 2015,

Gianyar Targetkan

Nihil Anak Miskin

Gianyar (Bali Post) -

Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata menargetkan pada akhir 2015, di Kabupaten Gianyar tidak ada atau nihil anak miskin. Hal ini dengan catatan, pendataan keluarga yang dilakukan oleh petugas kader pendataan keluarga mendapatkan data riil yang terjadi di lapangan. Dengan data itu, pemkab akan memberikan bantuan sehingga tidak lagi ada kemiskinan di Gianyar.

Hal itu terungkap saat Bupati menerima kader pendataan keluarga di kediamannya di Puri Agung Gianyar, Jumat (29/5) kemarin. "Dengan sistem pendataan langsung ke rumah-rumah nantinya dida-

pat data yang riil," katanya.

Pendataan keluarga merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 5 tahun sekali (*data by name by address*). Data yang didapat

ini nantinya akan dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Selain itu, terse-

dianya *data base* demografi kependudukan, *data base* KB, *data base* tahapan keluarga sejahtera, dan *data base* anggota keluarga.

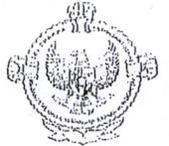
Dengan datang langsung ke alamat warga, tentu akan dapat dilihat secara langsung pula kondisi rumah, keadaan keluarga, apakah masih prasejahtera, keluarga sejahtera 1, atau sudah sejahtera. Apalagi terkait dengan komitmen Gianyar menuju Kota Layak Anak

(KLA), pendataan anak miskin diharapkan lebih akurat.

Data tersebut nantinya menjadi acuan yang lebih tepat guna memberikan bantuan kepada anak-anak miskin di Gianyar. Sehingga komitmen pada akhir tahun 2015, tidak ada anak miskin lagi di Kabupaten Gianyar bisa tercapai. Masyarakat dalam hal ini juga diminta untuk bersikap *welcome* kepada petugas yang datang ke rumah. (kmb16)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 11



Ranperda PPNS

Peran PPNS

Harus Diperkuat

Tabanan (Bali Post) -

Meski sempat diwarnai adu argumen saat melakukan kajian terhadap ranperda PPNS dan Satpol PP, akhirnya DPRD Tabanan sepakat agar kedua ranperda tersebut ditetapkan menjadi perda. DPRD juga mengingatkan agar ke depan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diperkuat untuk menindaklanjuti ketentuan perda.

Juru bicara sekaligus Sekretaris Pansus II DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani membenarkan memang dalam rapat internal yang membahas kedua ranperda tersebut sempat alot khususnya tentang ranperda PPNS. "Sempat terjadi perdebatan, apa perlu perda itu dilanjutkan atau tidak karena dari UU yang ada, tidak ada keharusan ada PPNS," ujarnya.

Karena ada spesifik yang mengkhushus ada perda yang mengatur tentang sanksi pidana, ia mengatakan akhirnya disepakati bahwa perda ini ditetapkan untuk lebih memperkokoh posisi PPNS.

Omardani mengatakan dalam rapat internal tersebut memang ada sejumlah hal spesifik yang disoroti, salah satunya fungsi PPNS. "Selama ini fungsi PPNS seolah tidak ada di daerah,

padahal banyak sekali produk perda yang mengatur tentang sanksi pidana. Semua fraksi sepakat bahwa PPNS harus dioptimalkan. Bahkan ada keharusan bahwa setiap instansi yang ada produk perda terkait sanksi pidana wajib ditempatkan PPNS," ujarnya.

Yang paling mengerucut terkait PPNS itu, yakni terkait mutasi dimana harus ada laporan yang diajukan ke

menteri terkait mutasi dan itu ditegaskan kembali untuk tidak dilanggar.

Mantan Perbekel Belimbing ini menambahkan, untuk kebutuhan tenaga PPNS nantinya disesuaikan dengan jumlah perda yang terdapat unsur tindak pidananya. "Eksekutif juga harus detail melihat perda yang ada unsur tindak pidananya, mempelajari dan melihat kembali baru di sana dilihat kebutuhan PPNS-nya. Proses rekrutmen harus mengacu pada Permenhumkam," ujarnya.

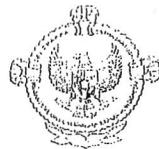
Dikatakannya PPNS wajib dari PNS, minimal dua tahun golongan 2B, dan

wajib memiliki pelatihan dasar dan rekomendasi dari Kejagung dan Kepolisian RI. Tak hanya itu, ia menegaskan jika ranperda ini nantinya ditetapkan eksekutif juga harus memperhatikan hak-hak PPNS. "Selama ini jarang ada yang mau jadi PPNS. Ke depan paling tidak perhatikan hak mereka sesuai kemampuan daerah," sarannya.

Terkait PPNS ini diakuinya jika jajaran legislatif hanya ingin memberikan penguatan terhadap kewenangan PPNS, serta untuk menciptakan Tabanan yang memang patuh pada ketentuan pada produk hukum. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 19



Bali Post/nik

Satpol PP Berangus 54 Reklame

Gianyar (Bali Post) -

Reklame tanpa izin masih marak terpasang di sejumlah kawasan di Kabupaten Gianyar. Terbukti dalam sehari, Satpol PP Gianyar berhasil memberangus 54 reklame dari berbagai lokasi di Gianyar, Jumat (29/5) kemarin.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan penertiban dengan melibatkan 10 anggota

PENERTIBAN - Penertiban reklame yang dilakukan petugas Satpol PP Kabupaten Gianyar Jumat (29/5) kemarin.

Satpol PP Gianyar ini, dimulai sejak Jumat pagi sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Kesatrian Gianyar. Di sepanjang kawasan tersebut petugas menurunkan dua reklame. Berlanjut ke seputaran Bitera, petugas yang dikomandoi Kasi Ops dan Tramtib Satpol PP Gianyar, I Wayan Suala Susila, ini menurunkan 15 reklame tanpa izin dan dipasang di pohon perindang.

Operasi berlanjut ke Jalan Semabaung, Blahbatuh. Di lokasi tersebut, Satpol PP mengamankan enam reklame tanpa izin. Berlanjut ke Jalan By-pass Dharma Giri Gianyar, Satpol PP menertibkan empat reklame. Di seputaran Desa Kemenuh, Sukawati petugas menurunkan paling banyak yakni 18 reklame.

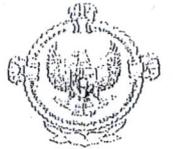
Belum puas dengan hasil tersebut sepuluh petugas ini kemudian bergerak ke Jalan

Raya Ketewel, Sukawati. Di sana petugas mengamankan delapan reklame tanpa izin dan salah pasang. Terakhir petugas menertibkan satu baliho di Jalan By-pass Dharma Giri.

Kasatpol PP Gianyar, I Gede Daging, mengatakan Satpol PP Gianyar secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar di wilayah Kabupaten Gianyar. Puluhan reklame berupa banner dan baliho diberangus petugas Satpol PP Gianyar karena tanpa izin, berizin namun kedaluwarsa, salah pasang dan memasang reklame pada pohon perindang jalan. "Mereka melanggar Perda No.9 tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Kini puluhan reklame hasil penertiban, diamankan di kantor Satpol PP Gianyar sebagai barang bukti," ujar I Gede Daging (kmb35)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 11



Satpol PP dan Dishub Tak Berwenang Kawal Pejabat di Jalan Raya

Singaraja
(Bali Post) -

Operasi Patuh Agung 2015 diterapkan di kawasan hukum Kabupaten Buleleng, dari tanggal 27 Mei - 9 Juni mendatang. Kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pembahasan menyinggung kewenangan pengawalan pejabat di pemerintahan. Izin mengawal di bagian depan bukan dilakukan Satpol PP atau Dishub.



Bali Post/dgk

AKP Nyoman Sugianyar Ardika

Kasat Lantas Polres Buleleng AKP Nyoman

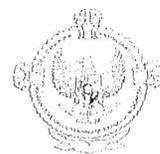
Sugianyar Ardika menerangkan, pengawalan di jalan sejatinya dilakukan kepolisian di depan mobil pejabat. Pihaknya menilai selama ini terjadi kekeliruan dan pengawalan pejabat sering didahului tanpa koordinasi. "Apabila Satpol PP melakukan pengawalan silakan melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian. Polisi akan mengawal di areal depan, dan Satpol PP untuk pengawalan penutup. Jangan sampai itu disalahartikan, bagaimana pun berat tugas di lapangan, kami siap berkoordinasi," terang Sugianyar, Jumat (29/5) kemarin.

Pihaknya menambahkan, sebagai pengayom masyarakat, polisi tidak ingin terjadi salah kaprah tugas di lapangan. Belakangan sering kali terpantau pengawalan pejabat dilakukan Satpol PP dan Dishub. "Ya melanggar itu, bisa dikatakan ilegal. Sesuai undang-undang, yang berhak melakukan pengawalan (mengawal pejabat daerah -red) adalah kepolisian. Kalau Dishub sudah berkoordinasi dengan kami, untuk melakukan pengawalan di belakang. Di lapangan, anggota polisi selalu siap mengawal di jalan," tambahnya.

Selain itu, kegiatan Operasi Patuh Agung bertujuan menurunkan angka kecelakaan kendaraan bermotor, meningkatkan disiplin, dan menekan tindak kriminalitas di tempat umum. Terhadap pelanggar rambu lalu lintas, kebut-kebutan, dan pengawalan ilegal, akan tetap mendapat tindakan tegas. Konvoi kendaraan tanpa koordinasi polisi, tergolong pengawalan ilegal. Instansi terkait turut diminta meningkatkan komunikasi ke kepolisian. "Konvoi juga harus berkoordinasi bersama petugas kepolisian," ujar Sugianyar. (kmb34)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 10



Soal Kubu Termiskin

Bupati Geredeg Salahkan Data Camat

Amlapura (Bali Post) -

Pernyataan Camat Kubu Made Suartana soal Kecamatan Kubu termiskin di Karangasem, direspons Bupati Wayan Geredeg. Di depan ratusan tokoh masyarakat Kubu, saat sosialisasi pembangunan di Tulamben, Jumat (29/5) kemarin, Bupati Geredeg justru menyalahkan data yang disampaikan camat.

Menurut Bupati asal Desa Sibetan itu, data Camat Kubu Made Suartana salah dan harus diperbaiki. "Data Pak Camat yang mengatakan Kecamatan Kubu termiskin di Karangasem itu salah. Datanya agar diperbaiki," katanya.

Menurut Bupati Geredeg, kecamatan dengan warga termiskin di Karangasem saat ini yakni Kecamatan Abang, disusul Kecamatan Karangasem. Menurut Geredeg, dulu

Kecamatan Kubu memang termiskin. Namun karena nyaris tiap tahun digelontor dengan anggaran tertinggi, terutama di bidang pembangunan dan penghotmikan jalan, kini Kubu sudah tak termiskin.

Namun, Geredeg tak memaparkan kenapa masih banyak penggepeng berasal dari wilayah Kubu. Dari pantauan, sejumlah petugas Dinsos atau Pol PP dari Pemkab/Pemkot di Bali, selama ini sudah

berulang kali memulangkan ratusan penggepeng baik dari Munti Gunung, Pedahan dan sekitarnya. Bahkan tiga hari lalu, Pol PP Pemkab Karangasem di pasar senggol menangkap lima penggepeng dari Pedahan. Mereka terpaksa menggepeng, karena hasil pertanian sebagai bahan makanan mereka sudah ludes, akibat paceklik karena musim tanam lalu hasil pertanian mereka tak banyak.

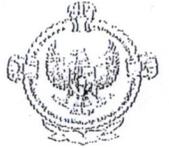
Selain menyoroti data Camat Kubu, Bupati Geredeg juga menyoroti adanya pernyataan bacabup/bacawabup yang sudah mendeklarasikan diri maju bertarung pada Pilbup 9 Desember di Karangasem. Menurut Bupati dua periode ini, ada pernyataan bacabup yang mengatakan tak perlu *neko-neko* atau mengemis mencari anggaran ke pusat. Padahal, menurut Geredeg, untuk membangun Karangasem yang luas dan 6,88 persen penduduknya masih miskin diperlukan anggaran besar. Jadi APBN yang mencapai Rp 2000 triliun perlu direbut untuk membangun

Karangasem. "Kita bukannya *neko-neko*, tetapi minta hak kita," tambahnya.

Menurutnya, kalau ada bacabup mengatakan tak perlu mencari dana ke pusat, Geredeg menduga bacabup itu tak mengerti *kangin-kauh* (tak tahu juntrungan) dan tak kenal siapa-siapa sehingga dia tak memiliki akses ke pusat. "Kalau tak punya akses, *nyenkar gabag* (siapa yang mau dihubungi). Akhirnya, dia mencari *pamatut* (pembenar sendiri-red). Baru menjadi bakal calon saja sudah berani mengatakan tak perlu *neko-neko* mencari anggaran ke pusat," tandasnya sengit. (013)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 12



Soal Restoran Tanpa Izin Pemkab Belum Bertindak

Gianyar (Bali Post) -

Delapan bulan beroperasi tanpa izin usaha dan melanggar sempadan pantai, tidak serta merta membuat Pemkab Gianyar bertindak sesuai rekomendasi dewan. Sementara pihak restoran yang sudah mendapat Surat Peringatan pertama (SP I), hingga kini belum memenuhi panggilan untuk datang ke Kantor Satpol PP Gianyar.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Gianyar Ngakan Putu Dharmajati mengatakan belum bisa mengeluarkan keputusan sesuai rekomendasi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar, untuk membongkar akomodasi pariwisata yang tidak berizin dan melanggar aturan tata ruang. "Ada sejumlah prosedur yang harus dilewati sebelum bertindak ke arah tersebut," terangnya.

Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan izin usaha restoran untuk lokasi tersebut. Namun bila kini pemilik bangunan berinisiatif mengajukan izin, BPPT Gianyar tetap akan menerima dan melakukan kajian dengan tim terkait. "Kalau memang ada permohonan ya kita terima, tapi nanti tim yang akan menentukan apakah ini layak atau tidak. Bila tidak layak tentu akan kami sampaikan," ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Gianyar I Gede Daging mengatakan dua hari berselang setelah dijatuhkannya SP I, restoran atas nama I Made Karang tersebut belum memenuhi panggilan. "Dalam SP I kita memberi waktu satu minggu, bila dalam kurun waktu tersebut juga tidak dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan SP II," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, akomodasi wisata yang berdiri tanpa izin dan melanggar sempadan pantai di Pantai Keramas, mendapat respons keras dari anggota dewan. Bahkan komisi I DPRD Kabupaten Gianyar ini mengajukan rekomendasi kepada Bupati Gianyar, agar memerintahkan jajaran terkait untuk membongkar akomodasi pariwisata tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gianyar Nyoman Artawa Putra meminta Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan tindakan tegas terhadap pelanggar, dengan membongkar akomodasi wisata yang baru dibangun tanpa mengantongi izin dari BPPT, serta melanggar aturan tata ruang 100 meter dari sempadan pantai. "Kami merekomendasikan kepada Bupati Gianyar, agar memerintahkan jajarannya untuk membongkar," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 11



Soal Vila di TNBB

PHKA Nyatakan Tak Perlu

IMB, Dewan akan Minta

Penjelasan Menteri LH

Singaraja (Bali Post) -

Pembangunan vila, restoran, dan kolam renang di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) oleh PT Trimbawan Swastama Sejati yang belum dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB), disikapi Dirjen Pengusahaan Hutan Konservasi Alam (PHKA). Pembangunan sarana wisata yang merupakan pengembangan investasi itu dinyatakan tidak harus dilengkaiki dengan IMB yang diterbitkan oleh Pemkab Buleleng.

Alasannya, karena adanya Surat Edaran (SE) No. 2/Menhut/IV/2007 tanggal 6 Juli 2007. Meski demikian, dewan Buleleng akan tetap minta penjelasan Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya.

Demikian terungkap ketika Komisi II DPRD Buleleng melakukan koordinasi ke Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Jumat (29/5) kemarin. Rombongan Komisi II dipimpin ketuanya Putu Mangku Budiasa bersama beberapa anggotanya.

Mereka diterima Sekretaris Dirjen PHKA Novianto Bambang dan Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Hartono.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa via telepon kemarin, mengatakan, walau hasil koordinasi ke Dirjen PHKA belum memuaskan, pihaknya masih tetap mempertanyakan terkait investasi yang terkesan tidak mengikuti aturan perizinan di daerah. Apalagi, pembangunan vila dengan kapasitas sepuluh kamar, sarana restoran, dan ko-

lam renang tersebut terindikasi melanggar sempadan pantai. Dengan fakta ini, Budiasa menyatakan kalau pengembangan investasi tersebut tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari segi retribusi dari perizinannya, namun investasinya menyalahi aturan terutama menyangkut sempadan pantai. "Meski Dirjen PHKA menyebut pembangunan sarana itu tidak perlu mencari IMB karena sudah mengantongi SE Menhut, kami masih berupaya dan masalah ini akan dimintakan penjelasan kepada Ibu Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.

Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan dari Desa Selat Kecamatan Sukasada ini mengatakan, setelah koordinasi ini, pihaknya telah menjadwalkan untuk mengundang pihak eksekutif dalam hal ini tim investasi, Pol. PP, dan instansi terkait lainnya. Pertemuan ini untuk membahas prosedur pemenuhan perizinan sekaligus menentukan sikap tegas pemerintah daerah dalam mengatasi pengembangan investasi yang tidak mencari IMB

karena sudah dilindungi SE Menhut. "Karena masalah ini masih dibawa ke Menteri, kami di daerah akan tetap membahas dan mengundang pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahannya dan jangan

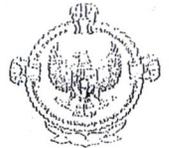
sampai ini menjadi preseden buruk dan diikuti oleh investor lain," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Investasi Pemkab Buleleng, Ketut Suparto, tidak berkomentar terhadap persoalan di TNBB tersebut. Suparto pun berdalih tidak berani berkomentar karena masih melakukan penelusuran dan mengecek dokumen dari investasi tersebut. Selain itu, sikap tim investasi ini tidak lepas karena pengembangan investasi itu berada di kawasan TNBB yang mana kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Buleleng menemukan pembangunan vila, restoran, dan kolam renang di kawasan TNBB yang belum dilengkapi dengan IMB. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 9



Upaya Muluskan Agenda Investor

WALHI Bali merupakan satu-satunya LSM penolak reklamasi Teluk Benoa yang hadir dalam sosialisasi di Dinas Kehutanan Bali. Direktur Eksekutif Walhi Bali Suriadi Darmoko menilai, rencana tukar-menukar kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya dengan kawasan di luar dari kawasan hutan hanyalah untuk menghilangkan atau menghapus status Pulau Pudut dan sekitarnya seluas 169,95 hektar dari kawasan hutan. Dengan demikian, secara otomatis Pulau Pudut dan sekitarnya akan menjadi Zona P atau kawasan budi daya sesuai isi Perpres No.51 Tahun 2014 yang boleh direklamasi.

"Ini menunjukkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa juga tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sekalipun telah terbit Perpres 51, ternyata mereka masih melanggar. Sehingga upaya untuk melakukan tukar-menukar kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya seluas 169,95 hektar adalah bagian dari upaya untuk memuluskan agenda investor mereklamasi Teluk Benoa," tegasnya.

Hal. 27

Kawasan Hutan

Kawasan Hutan

Dari Hal. 1

Suriadi juga menilai tidak tepat jika Dinas Kehutanan ingin tukar-menukar kawasan antara kawasan hutan di Pulau Pudut dan sekitarnya yang tidak ditumbuhi mangrove dengan kawasan di luar hutan yang ditumbuhi mangrove. Pasalnya, areal di luar kawasan Tahura seluas 238,79 hektar tersebut sejatinya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan berdasarkan Perpres No.45 Tahun 2011 maupun Perpres No.51 Tahun 2014.

"Untuk apa kawasan yang sudah dilindungi, mau dilindungi lagi? Jadi patut diduga tukar-menukar ini hanya sebagai kedok untuk mengeluarkan kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya dari kawasan Tahura, sehingga rencana reklamasi Teluk Benoa tidak terbentur status kawasan hutan," jelas

Suriadi.

Terkait hal ini, pihaknya pun melayangkan surat protes terbuka kepada Dinas Kehutanan. Dalam suratnya, Walhi Bali juga menuntut Dinas Kehutanan dan pihak terkait dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di daerah maupun pusat menghentikan upaya untuk mengeluarkan atau menghapus sebagian kawasan hutan di Teluk Benoa hanya demi untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Surat protes telah dikirim Jumat (29/5) kemarin, dengan tembusan ke Menteri LH dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi IV DPR-RI, KPK RI, Ombudsman RI, Komnas HAM, DPRD Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, DPRD Badung dan Denpasar, Bendesa Adat Tanjung Benoa serta Bendesa Adat Kelan. (kmb32)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 1 dan 27



Usut Dugaan Penyelewengan PHR

Giliran Dua Pejabat

Pemprov Bali

Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tampaknya kian serius mengungkap dugaan penyelewengan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung yang didistribusikan ke enam kabupaten di Bali. Jumat (29/6) kemarin, tim jaksa penyidik kembali memanggil dan memeriksa dua orang pejabat di Pemprov Bali. Kedua saksi yang diperiksa itu adalah Kabag Akuntansi dan Pelaporan Dewa Tagel Wirasa serta Kasubag Fasilitas Evaluasi dan Transfer Wayan Subagia. "Mereka di bawah Biro Keuangan Provinsi Bali," tandas salah seorang jaksa yang memeriksa, Made Tangkas.

Informasi di lingkungan kejaksaan, Bagian Keuangan Pemprov Bali mengetahui detail soal dana yang ditransfer serta peruntukan oleh kabupaten penerima bagian PHR Badung dan Kota Denpasar. Pasalnya, penyisihan PHR dari Badung dan Kota Denpasar terlebih dahulu dibawa ke provinsi sebelum disalurkan ke daerah penerima. "Kalau soal pendapatan, yang mengetahui persis Dispenda Badung. Tetapi penyalurannya kan lain. Kadispenda Badung juga sudah diperiksa dan sudah menyerahkan dokumen," kata salah seorang petugas kejaksaan.

Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa saksi-saksi di antaranya Adi Arnawa yang menjabat Kadispenda

Badung, mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana yang saat ini menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) Bali, Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi, Kabag Keuangan Bangli dan Tabanan. Selain itu, Kabag Keuangan Klung-

kung Gusti Ngurah Putra. Jadi, dalam perkara ini sudah belasan orang diperiksa sebagai saksi, namun belum ada peningkatan status dalam perkara ini.

PPTK Denpasar

Di tempat terpisah, jaksa penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kemarin kembali memeriksa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perjalanan Dinas DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made Patra. Dipang-

gilnya kembali PPTK yang telah diperiksa, Senin (25/5) lalu, disebabkan karena diduga banyak mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam perjalanan dinas tersebut. "Ya, ada pemeriksaan.

Dia PPTK. Ini bukan memeriksa ulang, namun melakukan pemeriksaan lanjutan. Ada beberapa keterangan yang kami perdalam untuk melengkapi kekurangan pemeriksaan yang lalu," tandas Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir saat ditemui di ruangan Posbakum Kejari Denpasar.

Pemeriksaan PPTK dirasa penting, karena Gusti Patra dinilai banyak tahu tentang proses perjalanan dinas tersebut sampai pada pencairan anggaran dari bendahara pengeluaran. "Karena banyak tahu, kami harus banyak menggali dari sumber ini. Dengan demikian, ada banyak data yang kami dapatkan," jelasnya. (kmb37)